

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Selama ini peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia masih terus diupayakan karena dalam pelaksanaannya belum dicapai hasil yang memuaskan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Kesalahan dan ketidaktertiban baik dalam pengelolaan, penyusunan, atau penyajian laporan keuangan di pemerintah daerah saat ini masih menjadi isu sentral (Abdul Halim, dkk. 2010:87).

Selain belum dicapainya hasil yang memuaskan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia masih terus diupayakan agar pemerintah daerah dapat mempertahankan hasil yang memuaskan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Adapun isu sentral lainnya yang membuat laporan keuangan di Indonesia khususnya pemerintah daerah terus menerus meningkatkan kualitasnya yaitu dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi.

Pemerintah melakukan reformasi di bidang Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi menurut UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah harus mampu mandiri dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, membuat peraturan sendiri (PERDA) beserta

peraturan dan pelaksanaannya, mampu mencari keuangan sendiri, dan harus mempunyai personil dan sarana prasarana sendiri (V. Wiratna Sujarweni, 2015:231). Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya otonomi daerah, membuat masing-masing pemerintah daerah bersaing untuk selalu mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerahnya sendiri termasuk dalam meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan bagaimana agar terus mempertahankan kualitas tersebut. Menurut PP No. 71 Tahun 2010, karakteristik kualitas laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitas laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mampu menyusun laporan keuangannya dengan baik dan mempertahankannya karena menyediakan informasi laporan keuangan merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Dalam upaya bersaing agar pemerintah daerah terus mempertahankan hasil laporan keuangan yang memuaskan pada saat ini, Pemerintah Daerah harus selalu menerapkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan masalah perimbangan antara Negara, pasar, dan

masyarakat (Abdul Halim, dkk. 2010:89). Dengan adanya globalisasi, pengetahuan masyarakat mengenai *good governance* semakin berkembang, sehingga pemerintah daerah pun dituntut untuk selalu melaksanakan pemerintahannya secara transparan dan akuntabel sebagaimana sesuai dengan prinsip *good governance*, sehingga pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam menyusun laporan keuangan dengan baik serta membuat laporan keuangan yang berkualitas.

Keberadaan organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan berhubungan dengan keberadaan Negara. Organisasi ini akan selalu ada, selalu penting, dan berperan utama dalam semua jenis organisasi di Indonesia, baik sektor privat maupun sektor publik. Kita mengharapkan akuntansi pemerintahan juga berkembang pesat seperti akuntansi perusahaan. Dengan akuntansi pemerintahan yang lebih maju, maka diharapkan pengelolaan sumber daya publik dan pertanggungjawaban juga lebih baik (Baldric Siregar, 2015:9).

Adanya globalisasi dan perkembangan teknologi membuat pemerintah daerah harus memiliki sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih maju. Melihat keadaan tersebut, guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya penerapan *good governance* sebagaimana dalam visinya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dilakukanlah penyusunan suatu program

aplikasi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya yaitu Program Aplikasi Komputer Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) versi 2.1 yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari program aplikasi sebelumnya yaitu SIMDA versi 2.0. Program aplikasi ini mulai telah diperkenalkan pada tanggal 29 Agustus 2006 ([bpkp.go.id](http://bpkp.go.id)).

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dikembangkan dengan tujuan menyediakan *database* mengenai kondisi di daerah yang terpadu, baik dari aspek keuangan, asset daerah, kepegawaian/aparaturn daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah; menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan, mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik; dan memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah ([bpkp.go.id](http://bpkp.go.id)).

Sejalan dengan RJPM Tahun 2010-2014, dalam Renstra Tahun 2010-2014, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menetapkan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah snagai kegiatan untuk mendukung capaian indicator kinerja “*Meningkatnya Tingkat Opini BPK Terhadap LKPD*”. Berdasarkan *website* BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, laporan keuangan kabupaten dan provinsi di Jawa Barat semakin baik dan bertahan dari tahun ke tahun. Adapun hasil pemeriksaan BPK berupa opini terhadap LKPD tahun 2011-2018 di Jawa Barat dapat dilihat dalam bentuk tabel dan grafik berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Trend Opini Pemeriksaan LKPD TA 2011-2018 di Jawa Barat**

Tahun	Opini				Jumlah Entitas Pemda
	WTP	WTP DPP	WDP	TMP	
2011	2	1	24	-	27
2012	3	-	24	-	27
2013	6	-	19	1	27
2014	13	-	14	1	28
2015	20	-	7	1	28
2016	25	-	3	-	28
2017	25	-	3	-	28
2018	25	-	3	-	28



Sumber: [bandung.bpk.go.id](http://bandung.bpk.go.id)

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan Opini Pemeriksaan LKPD TA 2011-2018 di Provinsi Jawa Barat**

Menurut situs BPKP, sampai dengan bulan September 2015, program aplikasi SIMDA telah diimplementasikan pada 425 pemda dari 542 pemerintah daerah yang ada atau sebanyak 78,41%, yang terdiri dari:

**Tabel 1.2**  
**Implementasi Program Aplikasi SIMDA pada Pemerintah Daerah di Indonesia.**

No	Jenis Implementasi	Januari 2016	Desember 2015	Penambahan/ pengurangan
1	Pengguna SIMDA	425 Pemda	425 Pemda	0 Pemda
2	SIMDA Keuangan	365 Pemda	365 Pemda	0 Pemda
3	SIMDA BMD	347 Pemda	347 Pemda	0 Pemda
4	SIMDA Gaji	69 Pemda	69 Pemda	0 Pemda
5	SIMDA Pendapatan	56 Pemda	56 Pemda	0 Pemda

Sumber: [bpkp.go.id](http://bpkp.go.id)

Sementara itu, Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto mengungkapkan bahwa hasil audit BPK tahun 2015 terhadap 542 pemda, sebanyak 311 pemda atau 57% telah memperoleh predikat tertinggi yaitu WTP dan yang patut kita banggakan bersama dari jumlah 311 pemda yang telah meraih predikat WTP, sebanyak 253 pemda atau 81% telah menggunakan aplikasi SIMDA dan dari 196 pemda yang telah meraih predikat WTD sebanyak 168 pemda atau 86% telah menggunakan aplikasi SIMDA ([jabarprov.go.id](http://jabarprov.go.id)).

Dalam berita *online* yang dipublikasikan oleh situs BPKP Perwakilan Jawa Barat, pada tanggal 10 Agustus 2016 BPKP Perwakilan Jawa Barat membuat Nota Kesepahaman Pengembangan Manajemen Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Deni Suardini selaku Perwakilan BPKP Jawa Barat mengatakan bahwa sebagai mitra BPKP Jawa Barat, siap setiap saat memberikan layanan dan konsultasi segala permasalahan dalam manajemen terutama manajemen pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan asetnya. Kaper Deni Suardini juga menjelaskan latar belakang, dasar hukum, dan standar manajemen pemerintahan yang bersih (*good clean government*)

yang mesti dilakukan untuk menghindari resiko penyimpangan yang melanggar hukum ([bpkp.go.id](http://bpkp.go.id)).

Kota Tasikmalaya sendiri meraih opini WTP untuk pertama kalinya pada tahun 2016 dan terus bertahan hingga tahun 2018. Selanjutnya, dalam berita *online* yang dipublikasikan oleh Kabar Priangan, pada tahun 2018 Pemerintah Republik Indonesia mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dengan memberikan penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2018 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ([kabar-priangan.com](http://kabar-priangan.com)). Berikut ini merupakan hasil opini BPK terhadap LKPD Kota Tasikmalaya dalam bentuk tabel:

**Tabel 1.3**  
**Opini LKPD Entitas Kota Tasikmalaya**

Tahun	Opini
	Kota Tasikmalaya
2011	WDP
2012	WDP
2013	WDP
2014	WDP
2015	WDP
2016	WTP
2017	WTP
2018	WTP

Sumber: [bandung.bpk.go.id](http://bandung.bpk.go.id) (diolah)

Melihat tabel perbandingan opini diatas, dapat disimpulkan bahwa Kota Tasikmalaya memiliki kualitas LKPD yang baik dalam 3 tahun terakhir. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya sangat perlu untuk selalu menerapkan *good governance* dan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dalam pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan dasar hukum, standar akuntansi pemerintahan,

dan standar manajemen daerah agar dapat mempertahankan kualitas laporan keuangannya.

Berdasarkan teori diatas, adapun hubungan antara *good governance*, sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan kualitas laporan keuangan, dimana *good governance* memiliki prinsip-prinsip yang diperankan oleh Akuntansi Sektor Publik yaitu profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (PP No. 101 Tahun 2000). Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, dalam rangka menerapkan *good governance* sesuai visi BPKP, dibuatkanlah suatu program aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA), SIMDA merupakan sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah berbasis teknologi informasi *Server-Client* yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan dan barang milik daerah yang relevan, cepat, akurat, lengkap, dan dapat diuji kebenarannya (Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 21 Tahun 2016). Dengan menerapkan SIMDA pada pengelolaan keuangan daerah, maka kualitas laporan keuangan pun akan meningkat. Adapun karakteristik laporan keuangan yang berkualitas yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan (PP No. 71 Tahun 2010).

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya Penerapan *Good Governance* dan Sistem Informasi



Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan serta Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap *Good Governance*.

Pada penelitian ini penulis juga mengambil beberapa referensi dari hasil penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Bahan penelitian tersebut diantaranya yaitu Miranda Miryam Miramis, Jenny Morasa, dan Heinze R.N Wokas (2018), mengkaji pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good governance* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada 10 SKPD di Kota Manado (Jurnal Riset Akuntansi *Going Concern*, Vol. 13, No. 3, p-ISSN: 1907-9737, e-ISSN: 2686-4215).

Emmi Suryani dan Ismail (2018), mengkaji Pengaruh *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan instansi Pemerintah pada Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi public baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah Aceh Besar (Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, Vol. 6, No. 1, p-ISSN: 2088-2614).

Ni Made Mei Anggreni, A. A. G. P. Widanaputra, dan I. G. A. M. Asri Dwija Putri (2018), mengkaji Penerapan *Good Governance* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada 32 OPD di Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* dapat

meningkatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang taat dengan aturan, memiliki prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kesimpulan diatas memberikan gambaran bahwa semakin baik penerapan *good governance* maka semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan pada OPD Kota Denpasar (E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 22, No. 1, e-ISSN: 2302-8556).

Mia Oktarina, Kharis Raharjo, dan Rita Audini (2016), mengkaji pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian secara statistik memberikan bukti bahwa *good governance* berpengaruh signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Semarang, khususnya di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Jurnal Akuntansi Universitas Pandaran Semarang, Vol. 2, No. 2, e-ISSN: 2502-7697).

Torang P. Simanjuntak (2019), mengkaji Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Karo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMDA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dimana presentase sumbangan pengaruh variable independen (penerapan SIMDA) terhadap variable dependen (kualitas laporan keuangan) didapat sebesar 24,7% sedangkan sisanya 75,3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian (Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Darma Agung, Vol. 18, No.1).

Rahmatia Azzindani, Endar Pituriningsih, dan M. Irwan (2019), mengkaji Pengaruh Implementasi SIMDA, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan SAP terhadap Kualitas LKPD Lombok Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable implementasi SIMDA berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas LKPD dan nilai *t-statistics* positif menunjukkan bahwa implementasi SIMDA memiliki hubungan yang searah dengan kualitas SKPD Lombok Tengah (e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 27, No. 1, ISSN: 2302-8556).

Patricia Diana, Chermian Eforis, Maria Stefani Osesoga (2018), mengkaji Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada satuan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMDA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dari nilai statistik *t* sebesar 16,033 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima. Besarnya pengaruh implementasi SIMDA terhadap kualitas laporan SKPD pada 63 SKPD Nias Selatan, maka diharapkan pemerintah daerah lainnya juga dapat ikut menerapkan SIMDA dalam penyusunan laporan keuangan (Jurnal ULTIMA Accounting, Vol. 10, No.2, ISSN: 2085-4595).

Christina Runtuwene, David P. E. Saerang, dan Jenny Morasa (2017), mengkaji Pengaruh Penerapan SIMDA, SAP, Motivasi Pegawai, dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMDA berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Nias Selatan (Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Vol. 8, No. 2, p-ISSN: 2099-8899, e-ISSN: 2715-1859).

Mohammad Alfian (2015), mengkaji Faktor Pendukung Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *t-statistics* dari pengaruh implementasi SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan yaitu sebesar  $8,44133 > 1,98$ , dimana hal tersebut membuktikan bahwa implementasi SIMDA berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan atau LKPD yang dihasilkan oleh SKPD (Jurnal Akuntansi Universitas Sebelas Maret, Vol. 18, No. 3, ISSN: 1979-6471).

Otniel Safkaur, Nunuy Nur Afiah, Sugiono Poulus, dan Muhammad Dahlan (2019), mengkaji tentang *The Effect of Quality Financial Reporting on Good Governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total efek dari kualitas laporan keuangan pada variable *good governance* di Provinsi Papua dan Papua Barat yaitu sebesar 38,6%. Ini Artinya, sebanyak 38,6% *good governance* dipengaruhi oleh factor kualitas laporan keuangan (*International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 9, No. 3, ISSN: 2146-4138).

Henny N. Tambingon Winwin Yadiati, Cecilia Lelly Kewo (2018), mengkaji tentang *Determinant Factors Influencing The Quality of Financial Reporting Local Government in Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pengaruh variable independen secara parsial diperoleh dari pengaruh total komitmen aparat, peran audit internal dan system informasi bersama-sama mempengaruhi t 63% yang

berarti perubahan 63% dalam kualitas laporan keuangan dijelaskan oleh kualitas system informasi akuntansi, komitmen aparatur, dan peran audit internal (*International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 8, No. 2).

Nunuy Nur Afiah dan Dien Novianty Rahmatika (2014), mengkaji tentang *Factors Influencing The Quality of Financial Reporting and Its Implications on Good Government Governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, kualitas laporan keuangan berkontribusi atau mempengaruhi sebesar 56.2% terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance*, (*International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 5. No. 1, ISSN: 2289-1552).

Azhar Susanto (2015), mengkaji tentang *Influence The Quality of Accounting Information on The Implementation Good Study Program Governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kualitas informasi akuntansi pada penerapan *good governance* memiliki hasil yang tinggi karena memiliki pengaruh sebesar 0,534 (nilai  $f_2$  diatas 0,35) yang berarti kualitas informasi akuntansi akan memberikan perubahan pada implementasi program *good governance* (*International Journal of Scientific & Technology Research*, Vol. 4. No. 12, ISSN: 2277-8616).

Nur Fitri Dewi, S. M. Ferdous Azam, Siti Khalidah, dan Moh. Yusoff (2019), mengkaji tentang *Factors Influencing The Information Quality of Local Government Financial Statement and Financial Accountability*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai  $t$  yang dihitung dalam variabel kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 6,870 lebih besar dari  $t$  tabel 1,65462 dengan nilai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan (*Management Science Letters*, Vol. 9, ISSN: 1373-1384).

Agustina, Tapi Anda Sari Lubis, dan Iskandar Muda (2017), mengkaji tentang *Various Aspects of The Implementation of SIMDA which Influence The Quality of Financial Statement with The Role of PPK-SKPD as Moderating Variable (A Case Study at The SPKD of Deli Serdang Regency)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, nilai koefisien pada pemanfaatan teknologi informasi (SIMDA) adalah sebesar 0,388 yang berarti memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dimana batas atas dan batas bawah pemanfaatan teknologi informasi yaitu sebesar 0,266-0,512 (*Advances in Economics, Business and Management Research (AEMBR) 1<sup>st</sup> Economics and Business International Conference (EBIC 2017)* Vol. 46 ISSN: 1373-1384).

Anggulyah Rizqi Amaliyah, Gaguk Apriyanto, dan Sihwahjoeni (2019), mengkaji tentang *The Effect of Competence Financial Manager, Internal Control System, and Utilization of Technology Information on The Quality of Financial Report*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji T menunjukkan sig 2 sebesar 0,013 atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti penggunaan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan (*International Knowledge Sharing Platform Research Journals of Finance and Accounting*, Vol. 10 No.4, e-ISSN: 2222-2847, p-ISSN: 2222-1697).

Fakhri Triasa Anggriawan dan Ivan Yudianto (2018), mengkaji tentang *Factors Affecting Information Quality of Local Government Financial Statement*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak informan menyebutkan bahwa dengan pemanfaatan teknologi informasi sangat berpengaruh dalam pembuatan dan penyajian laporan keuangan. Semua unit kerja regional Kabupaten Bandung Barat memiliki unit komputer yang dilengkapi dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah sebagai perangkat lunak terkemuka dalam mengelola dan membuat laporan keuangan pemerintah daerah (*Journals of Accounting and Business*, Vol. 1 No. 1 ISSN: 2614-3844).

Arik Susbiyani (2015), mengkaji tentang *Quality of Financial Statements as Implementation Good Governance Government on Local Government in Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah secara statistik signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (nilai p 0,004 atau lebih kecil dari 0,05) (*International Knowledge Sharing Platform Research Journals of Finance and Accounting*, Vol. 6 No.14, e-ISSN: 2222-2847, p-ISSN: 2222-1697).

Adapun penelitian yang memiliki hasil tidak signifikan yaitu diantaranya Desmaria Puji Kesuma, Choirul Anwar, dan Darmansyah (2017), mengkaji tentang Pengaruh *Good Governance*, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada satuan kerja Kementerian Pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *good governance* berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan *good governance* belum diterapkan dengan baik pada satuan kerja kementerian pariwisata (*Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika*, Vol. 1(2) 141-146, ISSN: 2337-6656).

Tuti Herawati dan Defi Nopianti (2017), mengkaji tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *good governance* berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan *good governance* belum diterapkan dengan baik pada pemerintah daerah di Jawa Barat (*STAR Study and Accounting Research*, Vol. 14(2) 10-45, ISSN: 1693-4482).

Handia Fahrurrozi (2019), mengkaji tentang Pengaruh Penggunaan SIMDA terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Dampaknya Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIMDA tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan dampaknya terhadap pencegahan *fraud* barang milik daerah. Hal ini dikarenakan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan selain SIMDA yang tidak dispesifikasikan dalam model penelitian dan mengindikasikan bahwa efektivitas pemanfaatan SIMDA dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan masih harus ditingkatkan (*Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2(2) 124-138, ISSN: 2685-1059).

Diana Sugiyantari dan Purnamie Titisari (2018), mengkaji tentang *The Effectiveness Implementation of The Regional Financial Management Information System Cloud at The Jember Regency*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hasil perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah memakai SIMDA *Cloud*, dimana penggunaan SIMDA *Cloud* jauh lebih efektif dibandingkan menggunakan



SIMDA versi sebelumnya (*International Journal of Research Science and Management*, Vol. 5 No. 5, ISSN: 234-5197).

Untuk lebih jelasnya mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian dahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.4**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang**

No	Peneliti, Tahun, dan Tempat	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber
1.	<b>Miranda Miryam Maramis, Jenny Morasa, dan Heince R. N. Wokas 2018 (Kota Manado)</b>	Variabel $X_1$ Penerapan <i>Good Governance</i> Variabel $Y$ Kualitas Laporan Keuangan. Menggunakan metode kuantitatif.	Tidak membahas Sistem Informasi Manajemen Daerah. Menggunakan analisis regresi berganda.	Hasil penelitian menunjukkan variabel $X_1$ dan $X_2$ secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Manado	Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 13 , No. 3 p-ISSN: 1907-9737 e-ISSN: 2686-4215 (2018)
2.	<b>Emmi Suryani dan Ismail 2018 (Kabupaten Aceh Besar)</b>	Variabel $X_1$ Penerapan <i>Good Governance</i> Variabel $Y$ Kualitas Laporan Keuangan.	Tidak membahas Sistem Informasi Manajemen Daerah. Menggunakan analisis regresi berganda. Metode survey.	Hasil penelitian menunjukkan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah Kabupaten Aceh Besar	Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh Vol. 6 No. 1 p-ISSN: 2088-5644 e-ISSN: 2614-008X (2018)
3.	<b>Ni Made Mei Anggreni, A. A. G. P. Widanaputra, I. G. A. M. Asri Dwija Putri</b>	Variabel $X_1$ Penerapan <i>Good Governance</i> Variabel $Y$ Kualitas	Tidak membahas Sistem Informasi Manajemen Daerah.	Hasil penelitian menunjukkan <i>Good Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas	E-Jurnal Akuntansi (Universitas Udayana) Vol 22 No.1 e-ISSN: 2302-

	<b>2018 (Kota Denpasar)</b>	Laporan Keuangan	Menggunakan analisis regresi berganda. Metode survey.	laporan keuangan pada 32 OPD di Kota Denpasar	8556 (2018)
4.	<b>Mia Oktarina, Kharis Raharjo, dan Rita Andini 2016 (Kota Semarang)</b>	Variabel $X_3$ Penerapan <i>Good Governance</i> Variabel $Y$ Kualitas Laporan Keuangan. Menggunakan metode kuantitatif.	Tidak membahas Sistem Informasi Manajemen Daerah. Menggunakan analisis regresi berganda.	Hasil penelitian menunjukkan <i>Good Governance</i> berpengaruh signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Semarang, khususnya di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jurnal Akuntansi (Universitas Pandaran Semarang) Vol.2 No.2 e-ISSN:2502- 7697 (2016)
5.	<b>Azlim, Darwanis, dan Usman Abu Bakar 2012 (Kota Banda Aceh)</b>	Variabel $X_1$ Penerapan <i>Good Governance</i> Variabel $Y$ Kualitas Laporan Keuangan. Menggunakan metode sensus.	Tidak membahas Sistem Informasi Manajemen Daerah. Menggunakan analisis regresi berganda.	Hasil penelitian menunjukkan penerapan <i>Good Governance</i> secara parsial berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan pada 27 SKPD di Kota Banda Aceh	Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Vol.2 N0.2 ISSN:2302- 0164 (2012)
6.	<b>Torang P. Simanjuntak 2019 (Kabupaten Karo)</b>	Variabel $X_1$ Sistem Informasi Manajemen Daerah Variabel $Y$ Kualitas Laporan Keuangan. Menggunakan metode kuantitatif.	Tidak membahas <i>Good Governance.</i> Menggunakan analisis regresi berganda.	Hasil penelitian menunjukkan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	Jurnal Fakultas Ekonomi (Universitas Darma Agung) Vol. 18 No. 1 (2019)

				Kabupaten Karo. Dimana presentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen didapat sebesar 24,7% dan sisanya sebesar 75.3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian	
7.	<b>Rahmatia Azzindani, Fadar Pituriningsih, dan M. Irwan 2019 (Kabupaten Lombok Tengah)</b>	Variabel $X_1$ Sistem Informasi Manajemen Daerah Variabel $Y$ Kualitas Laporan Keuangan. Menggunakan pendekatan kuantitatif.	Tidak membahas <i>Good Governance.</i> Menggunakan analisis regresi berganda.	Hasil penelitian menunjukkan variabel implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD dan <i>t value</i> positif menunjukkan implementasi SIMDA memiliki hubungan yang searah dengan kualitas LKPD di OPD Kabupaten Lombok Tengah	e-Jurnal Akuntansi (Universitas Udayana) Vol. 27 No. 1 ISSN: 2302- 8556 (2019)
8.	<b>Patricia Diana, Chermian Eforis, dan Maria Stefani 2018 (Kabupaten Nias)</b>	Variabel $X_1$ Sistem Informasi Manajemen Daerah Variabel $Y$ Kualitas	Tidak membahas <i>Good Governance.</i> Menggunakan metode survey.	Hasil penelitian menunjukkan implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh	Jurnal ULTIMA Accounting Vol. 10 No. 2 ISSN: 2085- 4595 (2018)

	Laporan Keuangan.	Menggunakan analisis regresi sederhana.	signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dari <i>t value</i> sebesar 16,033 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa $H_0$ diterima		
9.	<b>Christina Runtuwene, David P. E. Saerang, dan Jenny Morasa 2017 (Kabupaten Minahasa Selatan)</b>	Variabel $X_1$ Sistem Informasi Manajemen Daerah Variabel $Y$ Kualitas Laporan Keuangan. Menggunakan penelitian kuantitatif.	Tidak membahas <i>Good Governance</i> . Menggunakan analisis regresi berganda.	Hasil penelitian menunjukkan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Minahasa Selatan. Dimana <i>p value</i> diperoleh sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05	Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Universitas Sam Ratulangi) Vol. 8 No.2 p-ISSN: 2099-8899 e-ISSN: 2715-1859 (2017)
10.	<b>Mohammad Alfian 2015 (Kabupaten Kulon Progo)</b>	Variabel $X_1$ Sistem Informasi Manajemen Daerah Variabel $Y$ Kualitas Laporan Keuangan	Tidak membahas <i>Good Governance</i> . Menggunakan metode survey. Menggunakan analisis data <i>partial least square</i> .	Hasil penelitian menunjukkan <i>t value</i> dari pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap kualitas laporan keuangan yaitu sebesar 8,44133 lebih besar dari 1,98. Dimana hasil tersebut	Jurnal Akuntansi (Universitas Sebelas Maret) Vol. 18 No. 3 ISSN: 1979-6471 (2015)

---

				membuktikan bahwa Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kabupaten Kulon Progo	
11.	<b>Otniel Safkaur, Nunuy Nur Afiah, Sugiono Poulus, Muhammad Dahlan 2019 (Provinsi Papua dan Papua Barat)</b>	Variabel Y <i>Quality of Financial Reporting</i>	Tidak membahas Sistem Informasi Manajemen Daerah. Menggunakan <i>structural equation model</i> .	Hasil penelitian menunjukkan total efek dari kualitas laporan keuangan pada variabel <i>good governance</i> di Provinsi Papua dan Papua Barat yaitu sebesar 38,6%. Ini artinya, sebanyak 38,6% <i>good governance</i> dipengaruhi oleh faktor kualitas laporan keuangan.	<i>International Journal of Economics and Financial Issues</i> Vol. 9 No. 3 ISSN: 2146-4138 (2019)
12.	<b>Henny N. Tambingon, Winwin Yadiati, Cecilia Lelly Kewo 2018 (Unit Pemerintah Daerah di Indonesia)</b>	Variabel Y <i>Quality Financial Reporting</i>	Tidak membahas <i>Good Governance</i> dan Sistem Informasi Manajemen Daerah. Menggunakan <i>structural equation model</i> .	Hasil penelitian menunjukkan melalui pengaruh variabel independen secara parsial diperoleh dari pengaruh total komitmen aparat, peran audit internal dan sistem informasi bersama-sama mempengaruhi t 63% yang berarti perubahan 63% dalam kualitas laporan keuangan	<i>International Journal of Economics and Financial Issues</i> Vol. 8 No. 2 (2018)

---

---

				dijelaskan oleh kualitas sistem informasi akuntansi, komitmen aparatur, dan peran audit internal.	
13.	<b>Nunuy Nur Afiah, Dien Novianty Rahmatika 2014 (Karesidenan Pekalongan, Jawa Tengah)</b>	Variabel <i>Y</i> <i>Quality</i> <i>Financial</i> <i>Reporting</i>	Tidak membahas Sistem Informasi Manajemen Daerah. Menggunakan <i>partial least square</i> .	Hasil penelitian menunjukkan secara parsial, kualitas laporan keuangan berkontribusi atau mempengaruhi sebesar 56.2% terhadap penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .	<i>International Journal of Business, Economics and Law</i> Vol. 5 No. 1 ISSN: 2289-1552 (2014)
14.	<b>Azhar Susanto 2015 (Kota Bandung)</b>	Membahas <i>Good Governance</i> dan <i>Quality of Financial Reporting</i>	Variabel $X_1$ <i>Quality of Financial Reporting</i> Variabel $X_2$ <i>Good Governance</i> Tidak membahas Sistem Informasi Manajemen Daerah	Hasil penelitian menunjukkan pengaruh kualitas informasi akuntansi pada penerapan <i>Good Governance</i> memiliki hasil yang tinggi karena memiliki pengaruh sebesar 0,534 (nilai $t^2$ diatas 0,35). Nilai dari faktor akuntabilitas sebesar 0,792 lebih tinggi dari nilai faktor transparansi sebesar 0,606, independensi sebesar 0,664 dan kewajaran sebesar 0,623 yang berarti	<i>International Journal of Scientific &amp; Technology Research</i> Vol. 4 No. 12 ISSN: 2277-8616 (2015)

---

				bahwa kualitas informasi akuntansi akan memberikan perubahan pada implementasi program <i>Good Governance</i> .	
15.	<b>Nur Fitri Dewi, S. M. Ferdous Azam, Siti Khalidah Mohd Yusoff 2019 (Provinsi Sumatera Selatan)</b>	Variabel <i>Y</i> <i>Quality of Financial Reporting</i> Membahas salah satu prinsip dari Variabel $X_1$ <i>Good Governance</i>	Tidak membahas Sistem Informasi Manajemen Daerah	Hasil penelitian menunjukkan nilai <i>t</i> yang dihitung dalam variabel kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah sebesar 6,870 lebih besar dari <i>t</i> tabel 1,65462 dengan nilai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan	<i>Management Science Letters</i> Vol. 9 ISSN: 1373-1384 (2019)
16.	<b>Agustina, Tapi Anda Sari Lubis, Iskandar Muda 2017 (Deli Serdang)</b>	Variabel <i>X</i> <i>The Use of Technological Information</i> (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Variabel <i>Y</i> <i>Quality of</i>	Tidak membahas <i>Good Governance</i>	Hasil penelitian menunjukkan nilai koefesien pada pemanfaatan teknologi informasi (SIMDA) adalah sebesar 0,388 yang berarti memiliki	<i>Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR) 1<sup>st</sup> Economics and Business International Conference</i>

	<i>Financial Reporting</i>		pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dimana batas atas dan batas bawah pemanfaatan teknologi informasi yaitu 0,266-0,512	(EBIC 2017) Vol. 46 ISSN: 1373-1384 (2017)	
17.	<b>Anggulyah Rizqi Amaliyah, Gaguk Apriyanto, Sihwahjoeni 2019 (Kepanjen)</b>	Membahas <i>Quality of Financial Reporting</i> Dan <i>Utilization of Techonolgy Information</i>	Tidak membahas <i>Good Governance</i>	Hasil penelitian menunjukkan penggunaan teknologi informasi diukur dalam tiga indikator manfaat, dan efek dari konsekuensi jangka panjang. Berdasarkan jawaban responden terhadap data, rata-rata diwilayah “Sangat Tinggi” sama dengan 4,40. Dari skor ini menunjukkan bahwa jaringan internet tersedia untuk memudahkan pekerjaan. Hasil uji T menunjukkan Sig 2 sebesar 0,013 atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti penggunaan teknologi informasi mempengaruhi	<i>International Knowledge Sharing Platform Research Journal of Finance and Accounting</i> Vol. 10 No. 4 e-ISSN: 2222-2847 p-ISSN: 2222-1697 (2019)



				kualitas laporan keuangan.	
18.	<b>Fakhri Triasa Anggriawan, Ivan Yudianto 2018 (Kabupaten Bandung Barat)</b>	Membahas <i>Utilization of Technology Information</i> (Sistem Informasi Manajemen Daerah) dan <i>transparency</i> Membahas <i>Quality of Financial Report</i>	Tidak membahas <i>Good Governance</i>	Hasil penelitian menunjukkan banyak informan menyebutkan bahwa dengan pemanfaatan teknologi informasi sangat berpengaruh dalam pembuatan dan penyajian laporan keuangan. Semua unit kerja regional Kabupaten Bandung Barat memiliki unit computer dan dilengkapi dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah sebagai perangkat lunak terkemuka dalam mengelola dan membuat laporan keuangan pemerintah	<i>Journal of Accounting and Business</i> Vol. 1 No. 1 ISSN: 2614-3844 (2018)
19.	<b>Arik Susbiyani 2015 (Pemerintah Daerah di Indonesia)</b>	Membahas <i>Quality of Financial Reporting</i>	Tidak membahas <i>Good Governance</i> dan Sistem Informasi Manajemen Daerah	Hasil penelitian menunjukkan ukuran pemerintah daerah secara statistic signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (nilai p 0,004) atau lebih kecil dari 0,05.	<i>International Knowledge Sharing Platform Research Journal of Finance and Accounting</i> Vol. 6 No. 14 e-ISSN: 2222-2847 p-ISSN: 2222-1697 (2015)

20.	<b>Diana Sugiyantari dan Purnamie Titisari 2018 (Jember)</b>	Membahas Sistem Informasi Manajemen Daerah	Tidak membahas <i>Good Governance</i> dan <i>Quality of Financial Reporting</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hasil perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah memakai SIMDA cloud.	<i>International Journal of Research Science and Management</i> Vol. 5 No. 5 ISSN: 234-5197 (2018)
21.	<b>Desmaria Puji Kesuma, Choirul Anwar, dan Darmansyah (2017) (Kementrian Parawisata)</b>	Membahas <i>Good Governance</i> dan Kualitas Laporan Keuangan.	Tidak membahas Sistem Informasi Manajemen Daerah. Menggunakan metode survey, pengambilan <i>simple random sampling</i> , analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial <i>Good Governance</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika, Vol. 1(2) 141-146 ISSN: 2337-6656
22.	<b>Tuti Herawati dan Defi Nopianti (2017) (Jawa Barat)</b>	Membahas <i>Good Governance</i> dan Kualitas Laporan Keuangan.	Tidak membahas Sistem Informasi Manajemen Daerah. Menggunakan analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial <i>Good Governance</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	<i>STAR (Study and Accounting Research)</i> , Vol. 14(2) 10-45 ISSN: 1693-4482
23.	<b>Handia Fahrurrozi (2019) (Nusa Tenggara Barat)</b>	Membahas Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan.	Tidak membahas <i>Good Governance</i> . Menggunakan model persamaan structural dan <i>purposive sampling</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIMDA tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan dampaknya terhadap pencegahan <i>fraud</i> barang milik	Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2(2) 124-138 ISSN: 2685-1059

---

daerah.

---

**Merry Mawarni (2020): Penerapan *Good Governance* dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan ( Sensus Pada Badan dan Dinas di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis). Variabel  $X_1$  (Penerapan *Good Governance*), Variabel  $X_2$  (Sistem Informasi Manajemen Daerah), Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan).**

---

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Penerapan *Good Governance* dan Sistem Informasi Manajemen Daerah.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan *Good Governance*, Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan Kualitas Laporan Keuangan pada Badan dan Dinas di Kota Tasikmalaya.
2. Bagaimana pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara parsial pada Badan dan Dinas di Kota Tasikmalaya.
3. Bagaimana pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara simultan pada Badan dan Dinas di Kota Tasikmalaya

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari pemaparan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan *Good Governance*, Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan pada Badan dan Dinas di Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara parsial pada Badan dan Dinas di Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara parsial pada Badan dan Dinas di Kota Tasikmalaya.

#### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

##### a. Bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menerapkan *Good Governance* dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam pengelolaan keuangan daerahnya sehingga Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat terus mempertahankan kualitas laporan keuangannya.

##### b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan saran untuk menambah pengetahuan dengan menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh dari perkuliahan. Sedangkan dalam implementasinya diharapkan dapat menambah pengetahuan

mengenai Penerapan *Good Governance* dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang sedang mengkaji topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi**

Dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya pada Badan dan Dinas di Wilayah Pemerintahan Kota Tasikmalaya.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020. Kegiatan itu sendiri terdiri dari Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pelaporan.